



Kejari Segera Klarifikasi

Dana Parkir Senggol

GIANYAR - Kejaksanaan Negeri (Kejari) Gianyar pekan depan akan melakukan klarifikasi terhadap aliran dana parkir pasar senggol yang diduga diselewangkan. Pihak Kejari melalui Kasi Intel, Ketut Sadiartha akan memanggil beberapa prajuru desa pakraman Gianyar selaku pihak pengelola parkir pasar senggol. Untuk diketahui, pengelolaan parkir pasar senggol sendiri dikelola oleh desa adat Gianyar dan sedikit dananya disetor ke Pemkab Gianyar. Adapun pembagiannya sebesar 72 persen untuk desa pakraman dan 28 persen untuk Pemkab Gianyar. Dana bagi hasil itu sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Pemkab Gianyar dengan Desa Adat Gianyar sesuai perjanjian nomor: 011/10/PKS/B.TAPEM/II/2015 dan Nomor: 015/DAG/II/2045, tentang pengelolaan Pasar Senggol Gianyar.

Kasi Intel Ketut Sadiartha, seizin Kajari Yuliasuti, mengaku pengusutan dana parkir pasar senggol itu atas dasar pengaduan dari LSM Garda Tipikor Indonesia (GTI) yang ada di Gianyar pada 8 Agustus lalu. "Yang dilaporkan adalah dugaan indikasi kesalahan prosedur atau indikasi korupsi, jumlahnya mencapai Rp 2 miliar lebih," ujar Sadiartha, kemarin (4/10).

Dari laporan itu, sejumlah dana justru masuk ke rekening bendesa pakraman Gianyar. Justru, koperasi Geria Anyar Sari Boga yang bertindak sebagai badan usaha yang bekerja sama dengan Pemkab Gianyar hanya mendapatkan setoran dana 9 persen dari rekening bendesa. "Ada yang harus masuk koperasi dan petugas pungut dan ke



INDRA PRASETYA/RADAR BALI

MENYIMPANG: Pakir pasar senggol di Gianyar ini dikelola desa pakraman dan dananya dibagi bersama Pemkab Gianyar

Pemda (Pemkab, Red). Tapi kenyataannya, lebih banyak masuk ke rekening bendesa," jelasnya.

Kini, yang menjadi pertanyaan saat klarifikasi, untuk apa saja dana tersebut. "Untuk apa masuk ke rekening bendesa?," jelasnya. Padahal, lanjut Sadiartha, koperasi inilah yang bertindak sebagai badan pengelola parkir senggol. "Semestinya dana itu masuk ke rekening koperasinya, bukan malah ke bendesanya," jelasnya.

Dari klarifikasi itu, pihaknya akan melakukan pemanggilan paling lambat pekan depan. "Pemanggilan itu, kami akan tanyakan prosedur pengelolaan dan dananya untuk apa," jelasnya. Dari klarifikasi itu, apabila terdapat kecurangan atau permainan, maka kasusnya akan ditingkatkan. "Kami sudah buat telaah hukum. Dan kami sifatnya cari kebenaran, kalau ada kesalahan maka kami lanjutkan prosesnya," terangnya.

Sementara itu, dari telaah berkas, pihak Kejari menduga ada unsur penggelapan dana.

"Kalau kerugian uang negara di sini tidak ada, karena memang tidak ada kucuran uang negara. Tapi, ini sifatnya mendatangkan dana, retribusi. Jadi arahnya nanti kalau memang salah ke penggelapan," ungkapnya.

Selanjutnya, saat klarifikasi, pihak Kejari juga akan menanyakan dari mana desa pakraman menerima pendapatan yang sah. "Dasar kesepakatan apa, apakah paruman. Dan apakah dana masuk ke rekening bendesa ini diatur?," bebernyanya.

Diakukannya, Kejari bisa saja menghentikan proses hukum apabila saat klarifikasi tidak ditemukan adanya pelanggaran. (dra/rid)



PDAM Badung Banyak Bocor



DWIJA PUTRA/RADAR BALI

SIDAK: Komisi III dan IV meninjau instalasi PDAM Badung yang diduga banyak bocor di Ungasan kemarin.

Sidak Dewan Temukan 28 Sambungan Ilegal

MANGUPURA- PDAM Tirta Mangutama kembali mendapat sorotan dari Dewan Badung. Pasalnya, diduga ada sambungan ilegal di Jimbaran dan Ungasan. Hal itu terungkap ketika Komisi III dan Komisi IV melakukan inspeksi mendadak (sidak), Selasa (4/10). Temuan adanya sambungan PDAM ilegal ini membuat kalangan dewan geram.

"Pertama terungkap di Jimbaran. Dan kini kami menemukan (sambungan ilegal) lagi di Ungasan. Ada sekitar 28 sambungan yang kami temukan. Ini tidak menutup kemungkinan ada sambungan-sambungan lain yang kami duga ilegal" tandas Ketua Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria usai

melaksanakan sidak kemarin.

Satria meminta Direksi PDAM Tirta Mangutama bertanggungjawab. Mengingat dari catatan Komisi III sudah dua kali terungkap adanya sambungan PDAM ilegal dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Sidak Komisi III dan Komisi IV juga didampingi langsung Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Mangutama Wayan Suyasa, Sekretaris Dewan Pengawas Ida Ayu Eka Dewi Wijaya.

Satria menegaskan, adanya temuan ini mengindikasikan masih banyak sambun-

gan ilegal di tempat lain. Karena sejumlah kawasan di Kuta Selatan masuk zona merah karena belum disaluri air PDAM. Satria menuding temuan sambungan PDAM ilegal diduga permainan oknum pejabat PDAM sendiri. Pihaknya berjanji masalah

ini akan ditindaklanjuti serius. Bahkan akan menjadi bahan laporan kepada Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta.

"Ada juga usulan untuk membentuk pansus guna mengurai benang kusut sambungan yang diduga ilegal ini. Apala-

gi ini temuan kedua. Kita akan rapat lagi dengan teman komisi. Apakah kita serahkan masalah ini melalui jalur pidana atau seperti apa, tentu kita akan konsultasikan ke teman-teman dulu," tukas Politisi asal Mengwi ini. (dwi/dit)

Edisi : Kamis, 5 Oktober 2016

Hal : 23



Sediakan Anggaran Rp 5,6 Miliar

PEMKAB Buleleng tahun ini telah menyediakan anggaran Rp 5,6 miliar untuk menggaji 384 guru kontrak SMP dan SMA sederajat se-Buleleng. Anggaran sebesar itu dibagi menjadi 12 bulan dan setiap bulannya Pemkab harus mengeluarkan Rp 384 juta.

Kini Suyasa sedang berusaha untuk mengantisipasi permasalahan keterlambatan pembayaran gaji guru kontrak agar tidak terulang kembali. Di antaranya dengan melebihkan sedikit porsi anggaran setiap bulannya agar tidak terjadi *cash flow* yakni 2,5 persen sesuai teori akuntabilitas.

"Kita harus buat perencanaan dengan membuat *cash flow* yang matang, *cash flow* harus diatur saya kan baru April jadi kepala dinas, jadi *cash flow* dari awal sudah disiapkan jadi perhitungannya jangan menghitung pas," ujar Kepala Dinas Pendidikan Buleleng, Gede Suyasa.

"Tapi selama saya jadi kepala dinas dari Mei sampai Juli lancar, hanya Agustus saja yang tersendat. Jadi bulan ini Agustus sama September akan kita bayar. Minggu-minggu ini sudah akan cair," sambungnya. (gas)

Edisi : Rabu, 5 Oktober 2016

Hal : 5